

DAFTAR BACAAN

A. Literatur

- S. O. Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1990.
- Hamzah A., dkk, Delik – Delik Pers di Indonesia. Penerbit: Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Sadono Bambang, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1993.
- Iskandar Deddy, Jurnalistik Televisi, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- P. Djatmika, Strategi Sukses Berhubungan dengan PERS dan Aspek-Aspek Hukumnya, Penerbit: Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Susanto Edy, dkk, Hukum Pers di Indonesia, Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
- Mohamad Goenawan, dkk, Pers Hukum Dan Kekuasaan, Penerbit : Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994.
- Suwardi Harsono, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia. Penerbit : Sinar Harapan, 1993.
- Pandjaitan IP Hinca, Siregar Effendi Amir, Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers, Penerbit : Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Serikat Penerbit Surat kabar, 2004.
- Taufik I., Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia, Penerbit : P.T Triyindo. 1977
- Harahap Krisna, Kebebasan Pers di Indonesia dari masa ke masa, Penerbit: Grafitri, Bandung, 2000.
- Adjie Seno Oemar, Pers Aspek Hukum, Cetakan ke-2, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1977.
- Adjie Seno Oemar, Mass Media dan Hukum, Cetakan ke-2, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1977.
- Merzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Cetakan ke 7, Penerbit: Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011.
- Moegono R., Kumpulan Kuliah Delik Pers, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi Pada Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1975.
- Wahidin Samsul, Hukum Pers, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Team Pustaka Phoenix. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit : Pustaka Phoenix,

Jakarta, 2007.

Armada Wina, Menggugat Kebebasan Pers, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008) melalui Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.
- Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 01/DP/MoU/II/2012 No. 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.
- Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 01/DP/MoU/II/2013 No. 020/A/JA/02/2013 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.

C. Website

<http://wartakota.tribunnews.com/2016/05/17/dua-terdakwa-kasus-obor-rakyat-jalani-sidang-perdana>

<http://news.okezone.com/read/2016/05/17/337/1391070/ini-tulisan-tabloid-obor-rakyat-yang-diduga-hina-jokowi>

<http://news.liputan6.com/read/2508951/pemred-obor-rakyat-kami-hanya-mengerjakan-tugas-jurnalistik>

<http://news.liputan6.com/read/2509246/pemred-obor-rakyat-didakwa-sengaja-menyerang-jokowi>

<http://news.liputan6.com/read/2509447/jaksa-inisiatif-penerbitan-obor-rakyat-dari-setiyardi>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/08/tersangka-kasus-obor-rakyat-tidak-dijerat-uu-pers>

<https://m.tempo.co/read/news/2014/07/03/078589977/ditegaskan-lagi-obor-rakyat-bukan-produk-pers>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/dulu-tak-menyosal-pemred-obor-rakyat-kini-minta-maaf-pada-jokowi>